

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) DALAM MENYALURKAN GAJI INDUK YANG BERSUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEULABOH

Fitri Yani ⁽¹⁾, Fatmayanti ⁽²⁾, Daniel Sianturi ⁽³⁾

^{1,2} Fakultas Ekonomi/ Universitas Teuku Umar – Meulaboh

³ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh

e-mail: fitriyani011201f@gmail.com, Fatmayanti@utu.ac.id, Daniel.sianturi@kemenkeu.go.id

ABSTRACT

This study aims to identify problems that occur during the process of distributing APBN funds, one of which is the main salary using the SPAN application. The research design uses a qualitative descriptive design, this research was conducted at KPPN Meulaboh where the office is one of the sources for researchers in conducting interviews and collecting data in the process of distributing the main salary. The interview results show that the SPAN application has not been running effectively because there are still various shortcomings or obstacles in the process of disbursing the main salary that is felt by the Meulaboh KPPN staff such as an inadequate network that hampers office work and also inflexible job placement where the work can only be done at the office. . As for some that were analyzed, such as the effectiveness of using the SPAN application, comparisons between the manual system and SPAN, and also wanted to see the advantages and disadvantages of the two systems. Then the formulation in making policies on what are the problems in processing the main salary sourced from the APBN in using the SPAN application.

Keywords: SPAN, Main Salary, APBN.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terdapat pada saat proses penyaluran dana APBN yang salah satunya merupakan gaji induk menggunakan aplikasi SPAN. Desain penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan di KPPN Meulaboh dimana kantor tersebut adalah salahsatu sumber bagi peneliti dalam melakukan wawancara dan pengambilan data dalam proses penyaluran gaji induk. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aplikasi SPAN belum berjalan secara efektif karena masih terdapat berbagai kekurangan atau kendala dalam proses pencairan gaji induk yang dirasakan oleh staf KPPN Meulaboh seperti jaringan yang kurang memadai sehingga menghambat pekerjaan kantor dan juga penempatan pekerjaan tidak flaksibel dimana pekerjaan tersebut hanya bisa dilakukan dikantor. Adapun beberapa yang dianalisis seperti efektifitas penggunaan aplikasi SPAN, perbandingan antara sistem manual dan SPAN, dan juga ingin melihat kelebihan dan kekurangan dikedua sistem tersebut. Kemudian yang menjadi rumusan dalam mengambil kebijakan terhadap apa yang

menjadi permasalahan dalam memproses gaji induk yang bersumber dari APBN dalam menggunakan aplikasi SPAN.

Pendahuluan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh merupakan Ditjen Perbendaharaan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Didjen Perbendaharaan Provinsi Aceh, nama KPPN dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/.01/2008 yang merupakan perubahan dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Meulaboh yang berada dibawah Direktorat Jendral Perbendaharaan. Dalam menyalurkan biaya dengan penatausahaan penerima serta pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan (Zuhdi dan Amelia : 2015).

Untuk mendukung tugas KPPN Meulaboh dalam menyalurkan dana APBN, UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan UU, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan mengamati rasa keadilan dan kepatuhan. UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan alokasi, distribusi dan stabilisasi. Kemudian Pengelolaan dana APBN harus dikaukan dengan baik agar apa yang telah menjadi tujuan dari APBN tersebut dalam pembangunan dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan target yang di dinginkan, dan ditetapkannya Pengelolaan Belanja Negara (PBN) yang efektif bisa di lihat dari tingkat realisasi anggarannya apakah sudah sesuai dengan perencanaan pencairan dana atau tidak. (Debijayanti : 2020).

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh KPPN Meulaboh salah satunya ialah memproses Gaji Pegawai Negeri sipil (PNS)

yang bersumber dari APBN, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 yang mengatur tentang penyaluran gaji melalui rekening PNS Pusat, Prajurit TNI dan Anggota Polri menggunakan bank umum yang akan dilakukan secara terpusat, ada beberapa jenis gaji diantaranya, gaji induk, Gaji Tunjangan Hari Raya (THR), kekurangan gaji, gaji susulan, dan Gaji Terusan.

Sebelum tahun 2015 KPPN Meulaboh dalam memproses gaji induk terlebih dulu menggunakan manual, dengan demikian dalam melaksanakan tugas karyawan KPPN ketika memproses gaji pegawai banyak sekali kekurangan pada sistem manual sehingga sering terjadinya kesalahan-kesalahan pada proses penggajian Kemudian mendorong pemerintah dalam melakuakn pembaharuan pada sistem reformasi dalam pengelolaan keuangan sejalan dengan penelitian (Andy. 2017) diamana dalam penelitiannya juga menemukan banyak sekali kendala dalam proses penyajian karena dilakukan secara manual.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih pada era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Yahya dan Setiyono, 2022). Pemerintah menerbitkan aplikasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah salah satu sistem dalam penyempuraan sistem manajemen keuangan dan administrasi dimana penerimaan pemerintah yang sering disebut dengan Government Financial Management and Revenue Administration Project (GEMRAP) dalam Manajemen Keuangan Publik (vitryani, dkk, 2022). Hingga mulai berlaku penuh oleh seluruh KPPN di Indonesia mulai Januari 2015.

Sistem SPAN berkerja secara sistem melalui komputer SPAN dengan jaringan internet Kemenkeu untuk memvalidasi data secara otomatis secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Aplikasi SPAN dapat mempermudah para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dimana proses validasi yang cepat dan akurat, keamanan data terjamin, mengurangi pemakaian ATK berupa kertas dan lain-lain, dan penyimpanan database lebih terpusat sehingga dapat menyediakan data secara realtime. Tetapi aplikasi SPAN juga memiliki kekurangan dimana pekerjaan hanya bisa diselesaikan dengan adanya jaringan intranet yang hanya dikhususkan untuk Kementerian Keuangan, kemudian perkerjaan hanya bisa dilakukan dikantor karena tergantung pada kecepatan akses internet dan listrik setiap kantor dan juga hanya dapat dilakukan oleh user yang berwenang.

Beranjak dari persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat seefektif apakah pencairan gaji induk menggunakan aplikasi SPAN dan Peneliti nantinya akan melihat bagaimana perbandingan dalam memproses gaji induk yang bersumber dari APBN dengan menggunakan aplikasi SPAN dan manual. Serta untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut.

Landasan Teoritis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat mengenai rencana tahunan dan kemudian harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), APBN berisikan daftar yang sistematis dan terperinci dalam membuat perencanaan penerimaan hingga pengeluaran perencanaan dalam priode 1 tahun mendatang, anggaran ini dilakukan mulai dari 1 januari sampai

dengan 31 desember mendatang. (Mulyani dan Alia, 2020). Dimana hibah, pajak, dan penerimaan bukan pajak merupakan pendapatan yang diperoleh negara. Sedangkan pengeluarannya seperti dana belanja pemerintah pusat di transfer ke daerah berupa dana desa. (Jana, dkk : 2018)

Secara umum APBN memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kekurangan anggaran, panduan pengeluaran dan pemasukan anggaran negara dalam rangkaian melaksanakan tugas/pekerjaan negara dan meningkatkan peluang kerja hingga dapat diarahkan dalam peningkatannya serta pertumbuhan ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat, serta memelihara kestabilan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, APBN juga mempunyai fungsi yang tercantum pada Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003, yakni sebagai fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilitas, fungsi reguljasi, fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi otorisasi. Pedoman pemerintah tersebut dilaksanakan oleh seluruh KPPN termasuk KPPN Meulaboh sebagai tolak ukur dalam menyalurkan dana APBN. (Undang-undang nomor 17 tahun 2003).

Pencairan Dana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari pencairan dana “merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses merealisasikan, mengeluarkan, menyalurkan atau proses menguangkan dan diperbolehkannya pengambilan dana berupa uang tunai yang telah di sediakan untuk keperluan tertentu”

Gaji Induk

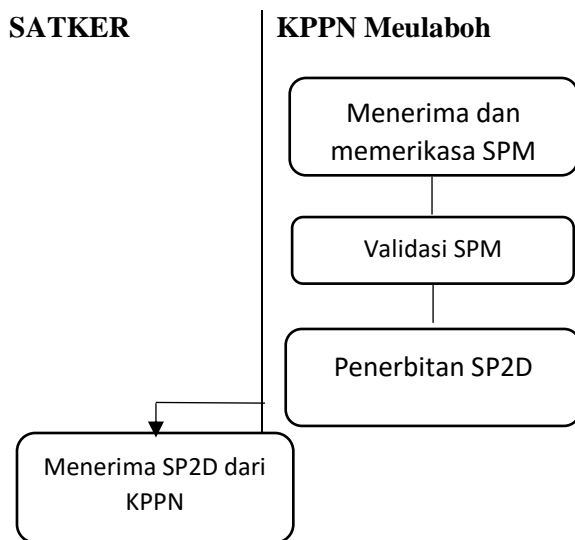
Berdasarkan peraturan Menteri keuangan republik Indonesia nomor 109/PMK.05/2012. Gaji induk merupakan gaji yang diberikan oleh pemerintah setiap 1 bulan kepada pegawai negeri sipil sesuai dengan surat keputusan satuan kerja (Satker)

melingkupi gaji utama/pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. (komariyah. 2016)

Dasar Hukum Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.50/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Keuanagan Nomor 190 / PMK /.2012 / tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Nomor 154/PMK.05/2014.

Alur Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil



Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN)

Sisitem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang kemudian disingkat menjadi SPAN merupakan salah satu dari proyek penyempurnaan manajemen keuangan hal tersebut merupakan Administrasi dan keuangan pemerintah. (Tumhury : 2015). SPAN adalah bagian dalam bentuk program dari sub-program pembaharuan **keuangan**

republik Indonesia terbesar di sepanjang sejarah Indonesia yaitu Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). SPAN merupakan aplikasi yang memindahkan data keuangan Negara mulai dari menyusun sampai dengan pelaporan anggaran, kegiatan tersebut dilakukan secara online yang dapat membawa perubahan pada prosedur kerja, aplikasi ini biasanya digunakan organisasi/instansi untuk kearah yang lebih baik lagi. (Nugroho, dkk : 2017).

Metode

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh. Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari 22 Maret sampai 16 Agustus 2022.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan merupakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena peneliti ingin melihat efektivitas penggunaan aplikasi SPAN dalam menyalurkan gaji induk yang bersumber dari APBN, untuk melihat perbandingan dari kedua sistem yaitu manual dan SPAN, kemudian untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem tersebut.

Pertanyaan dan Wawancara

Mekanisme Pencairan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pada tanggal 19 juli 2022 peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap 2 Staf KPPN Meulaboh yang bernama Bapak Trisna Mandala sekalu Staf Seksi Pencairan Dana dan Ibu Angreyni Simanjuntak Selaku Staf Seksi Bank, Peneliti bertanya dengan beberapa pertanyaan

diantaranya: Mekanisme Pencairan gaji Negeri Sipil PNS, efektivitas penggunaan aplikasi SPAN dalam pencairan gaji induk ?, Bagaimana perbandingan di antara kedua sistem tersebut ? dan kendala yang dirasakan dalam menggunakan aplikasi SPAN ?

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara adapun mekanisme pencairan gaji induk yang di mulai dari Proses Pemeriksaan Perhitungan Gaji Penerimaan. Dimana pemeriksaan kebenaran dan perhitungan gaji administrasi yang di butuhkan adalah ADK (Arsip data Komputer) yang dihasilkan dari Aplikasi Gaji, Rekapitulasi gaji seperti gaji tunjangan anak, gaji tunjangan istri dan lainnya. Kemudian daftar perubahan, yaitu apabila terjadinya perubahan status pada pegawai seperti kenaikan pangkat, status perkawinan dan lain-lain. Kemudian Satker mengirimkan data-data tersebut melalui media elektronik, untuk kemudian didownload dan direkonsiliasi gaji oleh KPPN. Petugas Seksi Pencairan Dana mengunggah ADK SPM ke SPAN untuk divalidasi dan disetujui secara sistem.

Proses selanjutnya yaitu Penyelesaian Tagihan Gaji Pada SPM kemudian SPM akan diverifikasi oleh Staff konversi menggunakan aplikasi cek supplier pada aplikasi SPAN kemudian pengecekan kebenaran SPM berupa pengecekan dokumen dan ADK serta mengecek kebenaran Gaji apakah gaji tersebut sesuai atau tidak. Secara garis besar, SPM yang telah diterima oleh Pegawai KPPN akan diperiksa dan divalidasi dari front office/middle office hingga diteruskan kepada Kepala Seksi Pencairan Dana untuk di verifikasi.

Terakhir pengecekan kesesuaian penerimaannya seperti, kebenaran No. Rekening Pegawai, Nama bank dan lain-lainnya. Keseluruhan proses tersebut sudah

dilakukan tersistem melalui Aplikasi SPAN. Kemudian yang terakhir adalah proses yang dilakukan oleh Staff Seski Bank, dimana Proses Penerbitan Surat Perintah Penyaluran Dana (SP2D). proses ini dilakukan oleh seksi Bank KPPN Meulaboh dalam memeriksa tanggal permintaan pembayaran gaji dalam aturan paling lambat tanggal 20 sebelum bulan berkenaan. Selanjutnya Pembuatan PPR (Process Payment Request) untuk masing-masing Bank penyalur dana gaji sesuai dengan bank yang digunakan oleh pegawai. Jika bank penyalur dana gaji yang digunakan merupakan Bank Syariah Indonesia (BSI) maka akan di proses sesuai dengan bank yang bersangkutan.

Selanjutnya adalah Proses persetujuan gaji beserta pengecekan tanggal pembayaran gaji induk, dalam Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.05/2012 pembayaran gaji diwajibkan pada tanggal 1 bulan berkenaan meskipun pada tanggal 1 itu berkenaan pada hari libur bank wajib mentasfer gaji pegawai tersebut. Hasil akhir dari proses SPM Gaji ini ialah berupa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Gaji. SP2D inilah yang akan menjadi dasar perbankan dalam menyalurkan dan mentransfer gaji setiap rekening pegawai.

Penggunaan aplikasi SPAN dari segi satker dan KPPN dapat dikatakan cukup efektif, dimana dalam penyajiannya dokumen jauh termanimalisir dari kesalahan input dan lebih efektif dilakukan karena dalam penyelesaian perkerjanya sudah terkomputerisasi oleh sistem, kemudian data base terpusat, sehingga bagi data yang ada lebih terjamin keamanannya. Setelah penggunaan SPAN di terapkan maka dalam proses penyelesaian SP2D dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 jam saja sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan

Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Perbandingan di antara kedua sistem tersebut amat sangat jauh dimana sistem manual dalam melakukan aktifitas kantor memakan banyak waktu dalam penyelesaiannya perkerjaannya, dapat kita dilihat dari segi penyerahan dokumen hingga kelengkapan data harus diberikan secara langsung oleh Satker ke KPPN Meulaboh. Kemudian dalam penyelesaian SP2D komponen yang ada dalam sistem manual masih belum berfokus sehingga belum terfasilitasi dengan baik, dalam penyelesaian SP2D dapat memakan waktu yang cukup lama yakni bisa mencapai 1 hari untuk penerbitan SP2D.

Seiring perkembangannya zaman Kementerian Keuangan menerbitkan aplikasi SPAN dan mulai berlaku penuh oleh seluruh KPPN di Indonesia mulai Januari 2015. Semenjak aplikasi SPAN di terapkan dalam memproses gaji induk jauh lebih efektif karena dari segi penyerahan dokumen tidak lagi menyerahkan secara langsung melainkan dapat dikirimkan melalui aplikasi SPAN, proses SP2D dapat dipersingkat hanya dalam waktu 1 jam saja hingga dapat terselesaikan. Kemudian kendala yang dirasakan oleh Staf KPPN Meulaboh dalam melakukan aktifitas kantor yakni lebih kepada teknis, jaringan yang kurang memadai, dimana aplikasi SPAN tidak bisa di akses dengan jaringan internet biasa atau wifi yang sering kita pgunakan, melainkan menggunakan jaringan Intranet yang di rancang khusus oleh Kementerian Keuangan untuk mengakses aplikasi SPAN diluar daripada itu aplikasi SPAN tidak dapat di akses, Maka dari itu memproses gaji induk tetap harus dilakukan di Kantor.

Kelebihan dan Kekurangan Pada Sistem Manual dan Menggunakan Aplikasi SPAN. kelebihan dari Aplikasi SPAN yaitu, Aplikasi SPAN dapat mempermudah para

Staf KPPN Meulaboh dalam melaksanakan pekerjaannya dimana proses validasi data lebih Efektif dan efisien, keamanan data terjamin, mengurangi pemakaian ATK, dapat menyediakan data secara realtime Adapun .kekurangan dari aplikasi SPAN yaitu, bergantung pada jaringan, pekerjaan tidak flaksibel dimana hanya bisa dilakukan di kantor. Kelebihan daripada manual yaitu tidak bergantung pada jaringan, Kerjaan lebih flaksibel dimanapun dapat diperiksa, penyimpanan database tidak terpusat dan kekurangannya yaitu, membutuhkan banyak tenaga, Membutuhkan waktu yang relatif tinggi/banyak, Sering terjadinya kesalahan input dalam memvalidasi data, Pemborosan pada alat tulis kantor (ATK).

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa tampak jelas perbandingan antara SPAN dan Manual dimana menggunakan sistem SPAN lebih efektif dibandingkan secara manual yang penggunaannya masih sangat rentan dengan kesalahan-kesalahan dalam memvalidasi data, meskipun begitu penggunaan Aplikasi SPAN juga masih memiliki kekurangan yang menghambat pekerjaan kantor, dimana sistem pelayanannya masih dikategorikan kurang dalam pelayanan teknis. Maka daripadaitu aplikasi SPAN perlu adanya perubahan atau demi kelancaran dalam proses pengerjaan penyaluran dana APBN bagi pegawai KPPN Meulaboh dalam memproses gaji pegawai.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya memproses gaji induk menggunakan SPAN cukup efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dimana pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat dan termanialisir kesalahan validasi data jauh berbanding dari pada sistem secara manual, meskipun begitu di kedua sistem

tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Meski aplikasi SPAN sudah dikategorikan efektif dibandingkan manual tetapi aplikasi ini juga tetap harus melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi agar sistem SPAN dapat mempermudah pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan lancar tanpa gangguan teknis dan gangguan-gangguan lainnya yang menghambat pekerjaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan saran yang dapat penulis ajukan untuk menunjang kelengkapan hasil penelitian ini yaitu agar Aplikasi SPAN dapat di upgrade agar dapat lebih baik lagi, dan kepada tim teknis aplikasi agar dapat menyediakan lebih banyak infrastruktur dan meningkatkan jaringan SPAN sehingga dapat berjalan dengan lebih baik lagi tanpa gangguan teknis, serta dapat menyediakan media khusus seperti VPN agar SPAN dapat di akses dimanapun sepanjang data dan informasi dapat dijamin keamanannya.

Daftar Pustaka

- Priambodo Andy. 2017. Efektivitas Penerimaan Negara dengan Penerapan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua Wilayah Kerja. Universitas Nusa Cendana Kupang
- Debijayanti Hera. (2020). Mekanisme Pencairan Dana Anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara makassar I(2) Universitas Muhamadiyah Makassar, diakses pada tanggal 22 juni 2022
- Kemenkeu. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK/234/KMK.01/2015 pada tanggal 21 Desember tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

<https://jdih.kemenkeu.go.id/> diakses pada tanggal 15 maret 2022

- Kemenkeu. (2009). Peraturan Dirjen perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 Tentang Petunjuk Teknis Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Diakses 18 maret 2022
- Kemenkeu. (2012) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN pembayaran gaji <https://jdih.kemenkeu.go.id/> diakses 18 maret 2022
- Kemenkeu. (2016) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/Pmk.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Menimbang: Penerima Pensiun Atau Tunjangan <http://jdih.kemenkeu.go.id/>
- Kemenkeu. (2008) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan <http://jdih.kemenkeu.go.id/>
- Lestari Yoman N. S. A, Bagia Wayan, & Jena Susila G. P. A. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Universitas Pendidikan Ganesha. 4(1), 24

- Nugroho Y.P. 2017. Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (Span) Dalam Proses Pencairan Dana Apbn Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. Universitas Airlangga. 71
- Novita & Diah Nurdiwaty.(2017) Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada UPTD SMPN 1 Purwoasri Kabupaten Kediri 2(2) 119. Universitas Nusantara PGRI Kediri
- Mulyani & Alia 2020. APBN dan Pedapatan Nasional 1(2), 57
- Nurul F. F. (2018) Penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Pencairan Dana di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon, Universitas Islam Indonesia. 21
- Rahmat. P. S. (2019). Penelitian Kualitatif, 1 <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf><https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/SPAN-Tingkatkan-Transparansi-Kuangan.pdf>
- Tuhumury Febriany B. S. (2015). Implementasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) pada Kator Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makasar II. Universitas Negeri Makasar. 2
- Undang-Uandang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2915 Tentang Anggaran Dan Pendapatan Negara Tahun 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Tarigan, dkk. (2022). Penerapan SPAN Pada Pencairan Dana Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Pematangsiantar (1716). Universitas Simalungun.
- Yahya A.F, & Setiyono. 2022. Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengolahan Pengaduan Aplikasi SPAN;LAPOR Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2
- Zuhdi Afifudin, dkk. (2015). Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Treats) Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto